



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
Nomor : W2-TUN2/ 152 /HK.07/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI dan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah ditetapkan/dicanangkan Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas perlu dibentuk Tim dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah;
 10. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 11. Perma RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1-144/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI, Nomor : 128/Djmt/SE/1/2019, Tanggal 29 Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2019 dan Pencanangan Zona Integritas ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG.

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Nomor : W2-TUN2/78/HK.07/1/2021 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim dan Evaluasi ZI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

KEDUA : Menetapkan Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Pembagian Area/Zonasi Kantor pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Tugas Pokok Tim Pokja dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana tertuang dalam Lampiran 3 Keputusan ini

KELIMA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, kepada Koordinator Area untuk dapat dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan melalui ketua sebagai bahan laporan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Januari 2022


KETUA
SUBUR MS, S.H., M.H.
NIP. 19670413 199303 1 006

Lampiran 2 Surat Keputusan

Tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung

Nomor : W2-TUN2/152/HK.07/1/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

**PEMBAGIAN AREA/ZONASI KANTOR
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG**

No	Lantai	Zoning
1	2	3
1	Lantai 1 (satu) a. Lobby Depan b. Lobby Belakang c. Ruang Posyankum d. Kantin e. Mushala	a. Area Pelayanan Administrasi Perkara, Meja Pengaduan, Meja Informasi dan Persuratan Umum (Area Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP) b. Area Pelayanan Persidangan (Ruang Sidang dan Ruang Tunggu Sidang) c. Area Pelayanan Bantuan Hukum d. Area Pelayanan Kantin e. Area Peribadatan
2	Area Parkir a. Halaman Depan b. Halaman Samping Barat c. Halaman samping Timur	a. Area Parkir Kendaraan Roda 4 Pegawai dan Pengunjung Sidang b. Area Menuju Ruang Sidang bagi Pencari Keadilan dan parkir Roda 2 tamu/Pengunjung Sidang c. Area Parkir Kendaraan Roda 2 Hakim dan Pegawai
3.	Lantai 2 (dua) Area Steril (Zona Integritas)	Area Ruangan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
4	Lantai 3 (tiga)	a. Area Ruangan Berkas Aktif b. Area Ruangan Berkas In Aktif c. Area Ruangan Perpustakaan

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Januari 2022



Lampiran 1 Surat Keputusan

Tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : W2-TUN2/152/HK.07/1/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

DAFTAR UNDANGAN TIM DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

NO	N A M A	J A B A T A N		KETERANGAN
		DINAS	TIM	
1	2	3	4	5
1.	Subur MS, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim	
3.	Ardoyo Wardhana, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua Tim 1	
4.	Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua Tim 2	
5.	Mokhammad Amirudin, S.H.	Sekretaris	Sekretaris 1	
6.	Asep Ahmad Sudrajat, S.T., M.A.P.	Kasub Bag Kepegawaian, Ortala	Sekretaris 2	

KOORDINATOR PENGUNGKIT

1.	Faisal Zad, S.H., M.H. Liza Valianty, S.H., M.H. Jimmy Riyant Natareza, S.H., M.H. Beni Mulyono Kadarisman, S.Kom Sri Wulan Luciyanti, S.H. Nasib Illahi, S.E., S.H. Ahmad Subadri, S.H. Henny Br. Situmorang, S.H. Armie Yuanita Eka Putri, S.E. Rudi Setiadi	Hakim Hakim Hakim Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti PPNPN PPNPN	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Manajemen Perubahan
2.	Hari Sunaryo, S.H. Erlly Suhermanto, S.H., M.H. R. Azharyanti Sinta Kusumah, S.H. Astri Utami Dewi, A. Md. Hidayat Pranki Stepanus W. Rista Deliyana Pujianto	Hakim Hakim Panitera Pengganti Jurusa Pengganti Pemelihara Sarana dan Prasarana PPNPN PPNPN PPNPN	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Penataan Tata Laksana

3.	<p>Ivan Mawardi, S.H., M.H. Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H. Asep Ahmad Sudrajat, S.T. Satya Nugraha, S.H. Sagiyo, S.H. R. Rita Hastuti Achmad, S.H. Diana Wahyuni Firdaus M. Wildan Wirandani</p>	<p>Hakim Hakim Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Bendahara Penerimaan PPNPN PPNPN</p> <p>Ka Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia</p>
4.	<p>Lusinda Panjaitan, S.H., M.H. Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H. Nuri Widiyanto, S.E. Nanang Edi Sutanto, S.H. Rosalia Haryani Kosasih, S.H. Patar Mallasak, S.T. Bambang M. Juliard, S.Kom. Nur Iman</p>	<p>Hakim Hakim Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Pranata Komputer PPNPN PPNPN</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Penguatan Akuntabilitas</p>
5.	<p>Kemas Mendi Zatmiko, S.H., M.H. Fadholi Hernanto, S.H., M.H. H. Biban A. Hobir, S.H. lin Novitalina, S.H. Lilis Heryani Badar Hikmat, A.Md. Hidayat Surya Ganda Vitriadin Rezka Nur Fadillah Yana Wijana</p>	<p>Hakim Hakim Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Pemelihara Sarana dan Prasarana PPNPN PPNPN PPNPN</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Penguatan Pengawasan</p>
6.	<p>Dikdik Somantri, S.H., S.Ip., M.H. Yustan Abithoyib, S.H. Ayi Solehudin, S.H., M.H. Wahyudi Siregar, S.H., M.H. Hj. Sitti Rahmatiah, S.H., M.H. Mokhammad Amirudin, S.H. Kiswono, S.H., M.H. Tri Wahyu Budiastuti, S.H. Dadan Suherlan, S.H. Faizal Wahyudin, S.H.</p>	<p>Hakim Hakim Hakim Hakim Panitera Sekretaris Panitera Muda Perkara Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>

<p>Heru Tjahjono, S.H. Retno Widyati, S.H. Rina Saptarini, S.H. Lia, S.E. M. Andri Ramdana Feryadi, S.Kom.</p>	<p>Panitera Pengganti Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Jurisita Pengganti Verifikator Keuangan PPNPN PPNPN</p>	<p>Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	
--	--	--	--

Catatan :

Wakil Ketua Tim 1 : Membawahi pengungkit 1, 2 dan 3 serta Penanggung jawab Inovasi Pelayanan
Wakil Ketua Tim 2 : Membawahi pengungkit 4, 5 dan 6 serta Penanggung jawab Ketersediaan dan Modernisasi Fasilitas Pelayanan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 17 Januari 2022



Lampiran 3 Surat Keputusan

Tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : W2-TUN2/152/HK.07/1/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

**TUGAS POKOK KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS (ZI)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG**

No	Program Penilaian	Tugas Pokok
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun Tim Kerja• Mendokumentasikan Rencana Pembangunan ZI• Memantau dan mengevaluasi Pembangunan WBK/WBBM• Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
2	Penataan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun Proses bisnis dan Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama• Merealisasikan E-Office• Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik
3	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Pegawai• Melaksanakan dan evaluasi Proses Mutasi Internal• Melaksanakan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi• Melaksanakan Penetapan Kinerja Individu• Melaksanakan Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik Hakim dan Pegawai• Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
4	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan Pemantauan Keterlibatan Pimpinan• Melaksanakan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
5	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">• Mengendalikan Gratifikasi• Melaksanakan Penerapan SPIP• Memproses Pengaduan Masyarakat• Mengupayakan Whistle Blowing System• Melakukan Penanganan Benturan Kepentingan
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun Standar Pelayanan Pengadilan• Membudayakan Pelayanan Prima• Melaksanakan Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Januari 2022


KETUA

SUBUR MS, S.H., M.H.
NIP. 19670413 199303 1 006